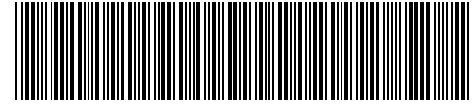




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099174/2025**



DS:7626-1520-8025-8373

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON
- Sebesar : Rp. 165.205.000 ( SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 165.205.000  
Rp. 165.205.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	165.205.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN LHOKSEUMAWE (089) Rp. 165.205.000

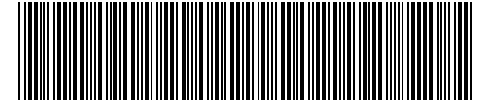
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				165.205.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				165.205.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan		1.500.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2,00	kegiatan		1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	218,00	Perkara, Berkas Perkara		118.265.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	218,00	Perkara		118.265.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	207,00	Orang		44.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	207,00	Orang		44.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	4,00	Perkara, Berkas Perkara		1.440.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	4,00	Perkara		1.440.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : (06) ACEH  
 Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	165.205.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	165.205.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



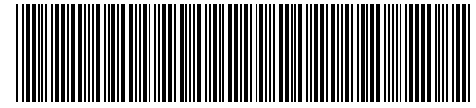
DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	-	165.205	-	-	-	165.205		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	165.205	-	-	-	165.205		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	165.205	-	-	-	165.205		
1049.AEA	Koordinasi (06.03 ACEH / KAB. ACEH UTARA)	-	1.500	-	-	-	1.500	06 . 03	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	089@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.03 ACEH / KAB. ACEH UTARA)	-	118.265	-	-	-	118.265	06 . 03	
01	RM	-	118.265	-	-	-	118.265	089@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (06.03 ACEH / KAB. ACEH UTARA)	-	44.000	-	-	-	44.000	06 . 03	
01	RM	-	44.000	-	-	-	44.000	089	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.03 ACEH / KAB. ACEH UTARA)	-	1.440	-	-	-	1.440	06 . 03	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON  
Kewenangan : (KD)

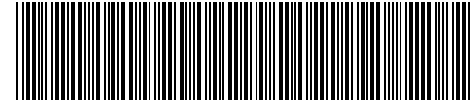
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.440	-	-	-	1.440	089	
<b>JUMLAH</b>		-	165.205	-	-	-	165.205		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (06) ACEH  
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099174	<b>PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.385	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.470	165.205
		<b>BELANJA BARANG</b>	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.385	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.470	165.205
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.385	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.470	165.205
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.385	13.635	13.635	13.635	13.635	13.635	14.470	165.205
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.067	48.639
		- PNB (425232)	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	583	6.930
		- PNB (425233)	994	994	994	994	994	994	994	994	994	994	994	996	11.930
		- PNB (425239)	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.488	29.779

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [06] ACEH  
Kode dan Nama Satker : [099174] PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

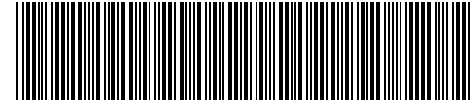
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
099174	<b>PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON</b>			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.		4.710
	52 Belanja Barang	Rp.		4.710
<b>005.03.BF 1049</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>			
<b>1049.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.		750
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
<b>1049.BCA</b>	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.		3.960
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:7626-1520-8025-8373

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [06] ACEH  
Kode dan Nama Satker : [099174] PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002